

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra. 2017. *Implementasi anggaran pemilihan kepala daerah serentak pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi 20015*. Tesis, Universitas Lampung
- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Salemba Empat: Jakarta
- Ahmad Zainuri. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum. Universitas Serang Raya.
- Andrie Fajar. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe*, Mahasiswa PSP Program Studi Tata Kelola Pemilu Pascasarjana UNSRAT
- Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino Electoral, 2006 Management Design, The International IDEA Handbook. Stockholm
- Abdul Halim, 2007 *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi2*. Jakarta: Salemba Empat
- Eftriani, Z, 2014, *Proses Perumusan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Tesis, Universitas Gadjah Mada
- Efri Nofrita. 2018. *Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Garrison, H. Ray; Eric W. Noreen; dan Peter C. Brewer. 2006. *Akuntansi Manajerial*. (terjemahan: A. Totok Budisantoso). Buku I Edisi Kesebelas. Salemba Empat. Jakarta.

- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002 hal 82
- Hamsan Jani. 2015. *Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2009. *Buku Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*, Jakarta
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Manulang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Galia Indonesia).
- Mullins, John W. Walker Jr., Orville, C., dan Boyd Jr., Harper W. 2008. *Marketing Management: A Strategic Decision Making Approach* 6thed. New York: McGraw Hill.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service*, terjemahan: *Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo
- Prof.Dr.Endriatmo Soetarto, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, 2014. *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan/Ivanovich Agusta*; cd.I-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Rasul, Syahrudin, 2003 *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Robinson, Marc and D. Last. 2009 *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. Technical Notes and Manuals. International Monetary Fund. Washington.
- Sri Nuryanti. 2015. *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumber daya, dan Eksekusi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Usep Hasan Sadikin. 2016. *Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada, Perludem*, Jakarta.
- Zatriawati. 2017. Yunus Sading, Vita Yanti Fattah, *Pengelolaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2015*. Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Tadaluko, Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Tadaluko.
- Zetra. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemilu. Modul Pembelajaran Tata Kelola Pemilu*. Fisipol Universitas Andalas.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jakarta: Pemerintah Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 166 ayat (1) “Pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undang” dan Pasal 200 ayat (1) “Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu (*unified budget*); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (*medium term expenditure framework*); dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budget*).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PB.05/2011 tentang mekanisme Pengelolaan Hibah mengatur Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang menerima Hibah diwajibkan untuk melaporkan penerimaan hibah langsung berupa uang/barang baik yang dibiayai dari dalam negeri atau luar negeri.

Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK-02/2014 jo PMK No. 57/PMK-02/2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Penetapan Keputusan Bupati mengenai Besaran Dana Hibah Pelaksanaan Pilkada 2015.

PP Nomor 58 Tahun 2005 pada pasal 18 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019.

Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/2015 disebutkan bahwa proses akuntansi dana hibah menggambarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi terkait hibah, sampai dengan menyajikan dalam laporan keuangan.

Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018

Website

Mendagri: Anggaran Pilkada Serentak sudah tercukupi, Total Rp.7,1 T, <https://m.detik.com> diakses 02 November 2018

<https://news.detik.com/berita/2020153/ini-keuntungan-dan-kelemahan-pilkada-serentak> diakses 17Maret 2019

Info_singkat/InfoSingkat- Kesiapan Pilkada Serentak 2015-Juli-2015/diakses 18 November 2019

Yenny Soetjipto: Fiskal Daerah Terbatas, Pilkada harus dari APBN. Wawancara jurnalis rumahpemilu.org, Debora Blandina (14/4/2015). <http://www.rumahpemilu.org/in/read/8680/Yenny-Soetjipto-Fiskal-Daerah-Terbatas-Pilkada-Harus-dari-APBN> di akses tanggal 02 Februari 2019

<https://www.beritasatu.com/nasional/348778/pengelolaan-anggaran-pemda-sering-diintervensi-legislatif> diakses 23/03/2019

<https://simonika2.kpu.go.id/login>,

Portal Bungokab.go.id (Kepala BPKAD, Drs. Supriyadi, ME Pentingnya Disiplin Anggaran dalam Penyusunan Anggaran). Diakses tanggal 15 Juli 2019

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-14-II-P3DI-Juli-2015-43.pdf. Di akses tanggal 03 Juli 2019

